

Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Dimediasi Oleh Pendapatan Asli Daerah dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran di Kabupaten/Kota Kalimantan Timur

Nur Hairiyah¹, Akhmad Yafiz Syam,^{2*} Lisandri

^{1,2,3} STIE Indonesia Banjarmasin, Indonesia

*) Korespondensi Email: yafiz@stiei-kayutangi-bjm.ac.id

Abstract

The purpose of this study is to empirically examine the effect of Economic Growth to Human Development Index with Locally Generated Revenue and The Excess of Budgeting Financing as mediating variables. The analysis was carried on 90 data consisted of 9 Regency/City in East Kalimantan for the last 10 years, done by using Path Analysis. The results show that Economic Growth is significant affecting Human Development Index. Similarly, it affected by Locally Generated Revenue and The Excess of Budget Financing. Indirectly testing show that Economic Growth affects the Human Development Index is mediated by Locally Generated Revenue. Economic Growth also affects the Human Development Index mediated by The Excess of Budget Financing. Economic Growth also effects the Human Development Index through mediation Locally Generated Revenue and The Excess of Budget Financing.

Keywords: *economic growth, locally generated revenue, the excess of budget financing, human development index*

1. Pendahuluan

Proses pembangunan di Indonesia berkaitan erat dengan implementasi desentralisasi fiskal dengan tujuan untuk meningkatkan kemandirian suatu daerah. Pembangunan daerah yang dilakukan secara otonom harus disertai dengan penguatan penerimaan fiskal sebagai landasan pembangunan. Penerimaan fiskal tidak luput dari adanya beberapa faktor, salah satunya ialah Pertumbuhan Ekonomi yang merupakan indikator dalam menilai pergerakan suatu daerah dalam kurun waktu periode tertentu (Siregar dan Pratiwi, 2017). Pertumbuhan Ekonomi diukur berdasarkan PDRB atas harga berlaku maupun harga konstan, PDRB atas harga berlaku disusun berdasarkan harga berlaku pada periode perhitungan yang telah ditentukan dan bertujuan untuk melihat kondisi perekonomian dan PDRB atas harga konstan disusun atas harga tahun dasar dan bertujuan untuk mengukur tingkat pertumbuhan ekonomi yang dipengaruhi oleh faktor harga. Pada penelitian ini, indikator Pertumbuhan Ekonomi yang digunakan adalah PDRB atas harga konstan. Pertumbuhan Ekonomi Kalimantan Timur terus mengalami pergerakan selama kurun waktu sepuluh tahun terakhir.

Secara umum, Pertumbuhan Ekonomi terus mengalami pergerakan. Pertumbuhan Ekonomi tertinggi terjadi pada tahun 2011 dan terendah terjadi pada tahun 2015, hal ini dipengaruhi oleh adanya kontraksi dari sektor penggalian dan pertambangan sebanyak -3,25 persen. Sumber Pertumbuhan Ekonomi di Kalimantan Timur hingga saat ini masih didominasi oleh sektor pertambangan dan penggalian. Pembangunan daerah yang ideal adalah pembangunan yang dilandasi oleh penerimaan fiskal yang baik. Salah satu sumber penerimaan pemda dalam menciptakan pelayanan public adalah Pendapatan Asli

Daerah (PAD). PAD memegang peranan penting dalam kegiatan operasional pemda (Kayame dkk., 2012). Dalam sepuluh tahun terakhir, PAD Kalimantan Timur secara umum terus meningkat.

PAD Kalimantan Timur tertinggi pada tahun 2014 yaitu mencapai 6,663 triliun sedangkan PAD terendah terjadi pada tahun 2010 dengan total penerimaan sebesar 2,711 triliun. Jika diamati lebih lanjut, pada tahun 2015 terjadi penurunan PAD yang cukup signifikan, penurunan tersebut merupakan implikasi dari kontraksi pada sektor penggalian dan pertambangan yang merupakan sumber utama penerimaan daerah di Kalimantan Timur. Selain Pertumbuhan Ekonomi dan PAD sumber penerimaan pemda yang menjadi indikator dalam pembangunan suatu daerah adalah Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA). Menurut Balitbangda dan Binatama (2008) SILPA terjadi apabila adanya surplus penerimaan dengan neto positif dimana jumlah penerimaan daerah lebih besar dibanding pengeluaran daerah dalam satu periode. Secara deskriptif, SILPA merupakan alat ukur dalam untuk menunjukkan kinerja pembangunan pemda, jika pada suatu daerah terus mengalami peningkatan SILPA yang relatif besar dari tahun ketahun, maka perlu dipertanyakan bagaimana alokasi dana dan pembiayaan di daerah tersebut.

Fitroh dan Putra (2016) menyatakan bahwa SILPA merupakan salah satu sumber pembiayaan yang digunakan untuk menyeimbangkan anggaran APBD sehingga pemda memiliki anggaran yang cukup dalam usaha peningkatan kualitas pelayanan dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan uraian di PMK No. 45/PMK.02/006. Di sisi lain, Tanjung (2009) menyatakan bahwa jumlah SILPA yang terlalu besar justru menandakan bahwa pemda tidak tepat dalam mengalokasikan anggarannya dimana harusnya kelebihan anggaran tersebut dapat digunakan untuk penyediaan pelayanan publik dalam rangka mensejahterakan masyarakat. Uraian tersebut memberikan makna bahwa terdapat pernyataan yang belum konsisten terkait SILPA sehingga perlu dilakukan pengujian lebih lanjut untuk mengetahui pengaruh SILPA terhadap pembangunan. Kalimantan Timur merupakan salah satu provinsi dengan jumlah SILPA yang relatif besar selama sepuluh tahun terakhir.

Tabel 1. SILPA Kalimantan Timur 2010-2019

Tahun	Jumlah
2010	Rp. 500.000.000.000
2011	Rp. 1.652.437.548.736
2012	Rp. 2.837.223.895.208
2013	Rp. 3.198.903.975.359
2014	Rp. 1.050.356.119.713
2015	Rp. 246.212.958.258
2016	Rp. 643.299.257.352
2017	Rp. 611.118.124.747
2018	Rp. 541.264.815.482
2019	Rp.1.861.926.227.625

Sumber : DJPK diolah 2020

Tabel 1 menunjukkan bahwa SILPA tertinggi terjadi pada tahun 2013 dan terendah pada tahun 2015.

Hal ini menjadi tantangan bagi pemda dalam mengefektifkan anggarannya, penggunaan SILPA hendaknya berimplikasi terhadap pembangunan manusia yang diukur menggunakan Indeks Pembangunan Manusia. Pembangunan yang ideal adalah pembangunan yang memberikan *impact* terhadap daya saing suatu daerah, pembangunan tidak hanya fokus pada sektor ekonomi dan infrastruktur, namun pembangunan yang ideal juga mampu meningkatkan pembangunan manusia. IPM telah diakui secara global sebagai salah satu faktor utama kekayaan bangsa dan merupakan suatu proses maupun metode untuk mencapai peningkatan kualitas hidup (UNDP, 1990). IPM diukur menggunakan tiga perspektif dasar diantaranya adalah umur 3anjang, pengetahuan serta standar hidup yang layak.

Kalimantan Timur berada pada urutan ketiga provinsi dengan nilai rata-rata IPM di atas nilai nasional (<https://databoks.katadata.co.id>). Pertumbuhan IPM Kalimantan Timur dapat dilihat pada gambar 1 berikut.



Gambar 1. IPM Kalimantan Timur 2010-2019

IPM Kalimantan Timur selama sepuluh tahun terakhir terus tumbuh dengan total pertumbuhan sebesar 5,30 poin (BPS, 2019b). Penelitian yang dilakukan oleh Fretes (2017), Mirza (2012), Rakhmawati dkk. (2017) dan Maulana dan Bowo (2013) telah membuktikan secara empiris bahwa Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh positif terhadap IPM, namun hasil penelitian tersebut bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Nainggolan dkk (2021) yang menyatakan bahwa Pertumbuhan Ekonomi tidak berpengaruh terhadap IPM. Fretes (2017) dan Wahyu dan Dwirandra (2015) menyatakan bahwa PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM, namun bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Farwas (2020) yang menyatakan bahwa PAD tidak berpengaruh terhadap IPM. Selanjutnya, Indrawati (2016) dan Wahyu dan Dwirandra (2015) menyatakan bahwa SILPA berpengaruh positif terhadap IPM namun Adiputra dkk. (2015) menyatakan bahwa SILPA tidak berpengaruh terhadap IPM.

Adanya ketidakonsistenan hasil penelitian terdahulu dan belum banyaknya penelitian terkait pengaruh SILPA khususnya yang menjadikan SILPA sebagai variabel mediasi memotivasi peneliti melakukan penelitian lebih lanjut untuk menguji pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Indeks Pembangunan Manusia dengan dimediasi oleh Pendapatan Asli Daerah dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran di Kabupaten/Kota Kalimantan Timur.

Teori Ekonomi Kesejahteraan

Pigou (1920) menyatakan bahwa ekonomi kesejahteraan merupakan hubungan kesejahteraan yang dapat dikaitkan secara langsung maupun tidak langsung. Ekonomi kesejahteraan mencakup beberapa aspek diantaranya ialah aspek ekonomi, kemiskinan, dan ketidaksejahteraan dan peran negara dalam

upaya peningkatan kualitas kehidupan manusia. Ekonomi kesejahteraan mencoba memaksimalkan tingkat kesejahteraan sosial dengan menguji kegiatan individu dalam masyarakat. Kesejahteraan masyarakat menjadi hal yang krusial dalam kehidupan bernegara dimana dalam mengukur tingkat kesejahteraan disuatu wilayah maka terdapat indikator penting yang menjadi tolok ukur dalam mengkaji hal tersebut, diantaranya ialah: 1) tingkat pendapatan keluarga, 2) komposisi pengeluaran rumah tangga dengan membandingkan dengan pengeluaran non pangan, 3) tingkat pendidikan keluarga, 4) tingkat kesehatan keluarga dan 5) kondisi perumahan serta fasilitas yang ada dalam kehidupan rumah tangga.

Indeks Pembangunan Manusia

IPM dikembangkan oleh Amartya Sen dalam bukunya *developmet as freedom*, kebebasan yang dimaksud oleh Sen adalah setiap warga negara bebas merasakan kesejahteraan yang merupakan hasil pembangunan yang tercapai (Sen, 2001). Menurut UNDP pembangunan manusia merupakan usaha dari pemerintah dalam memperbaiki taraf hidup masyarakat dimana masyarakat memiliki kebebasan untuk hidup lebih sehat, lebih berpendidikan dan memiliki taraf hidup yang layak. Pembangunan Manusia menjadi tujuan utama seluruh negara didunia sejak diterbitkannya *Human Development Report* oleh UNDP pada tahun 1990. IPM merupakan indeks campuran yang digunakan untuk mengukur capaian rata-rata suatu daerah dalam dalam tiga konsep dasar pembangunan manusia, yaitu: umur panjang, pengetahuan dan standar hidup yang layak (Mirza, 2012). Secara teoritis, cara menilai keberhasilan daerah dalam pembangunan manusia adalah dengan mengklasifikasikan IPM sebagai beberapa kategori, diantaranya ialah: $IPM \leq 60$: Rendah; $IPM \leq 70$: Sedang; $IPM \leq 80$: Tinggi dan $IPM \geq 80$: Sangat Tinggi (Syam dan Chandrarin, 2020).

Pendapatan Asli Daerah

Menurut Permendagri No. 13 Tahun 2006 PAD dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan, diantaranya adalah: pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan lain-lain yang dianggap sah. PAD bertujuan untuk memberikan wewenang kepada pemerintah daerah dalam mendanai penyelenggaraan otonomi daerah yang sesuai dengan potensi suatu daerah sebagai wujud implementasi desentralisasi fiskal, selain itu PAD merupakan alat ukur utama dalam melihat kemandirian suatu daerah dalam mencapai kemandirian daerahnya dan ketergantungannya kepada pemerintah pusat (Mutih, 2018).

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran

SILPA terjadi akibat adanya surplus penerimaan pemda dalam neto positif, dimana komponen pengeluaran lebih besar dibanding komponen penerimaan (Balitbangda dan Binatama, 2008). Keberadaan SILPA dapat berpengaruh terhadap anggaran APBD di periode selanjutnya, karena dana ini akan dipergunakan untuk menyeimbangkan anggaran dan menutupi anggaran di periode berikutnya (Megasari, 2015). Menurut Permendagri No. 21 Tahun 2011 SILPA merupakan sisa dana yang diperoleh dari aktualisasi penerimaan dan pengeluaran dalam satu periode. Bentuk penggunaan SILPA ada dua, yakni: (1) untuk melanjutkan kegiatan yang belum selesai di tahun sebelumnya dan (2) membiayai kegiatan baru yang tidak dianggarkan dalam APBD murni.

Pertumbuhan Ekonomi

Menurut Sukirno dalam Lamba dkk. (2020) menyatakan bahwa Pertumbuhan Ekonomi dapat menghasilkan barang dan jasa serta pelayanan di masyarakat akan meningkat dan berimplikasi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan Ekonomi merupakan salah satu indikator dalam melihat keberhasilan suatu daerah (Todaro, 1999). Pertumbuhan Ekonomi diukur berdasarkan laju pertumbuhan PDRB atas harga konstan yang merupakan harga riil suatu daerah dan tidak bersifat fluktuasi (Silalahi dkk. 2011).

2. Hipotesis

Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Indeks Pembangunan Manusia

Pertumbuhan Ekonomi merupakan indikator dalam melihat kemajuan pembangunan daerah yang diasumsikan akan melahirkan lapangan pekerjaan dan peluang ekonomi yang lain secara merata di suatu daerah Fretes (2017). Pertumbuhan Ekonomi merupakan salah satu indikator dari pembangunan suatu daerah, hal tersebut menjadikan pertumbuhan ekonomi menjadi krusial untuk melihat dari beberapa aspek, salah satunya ialah dalam mengukur pertumbuhan ekonomi melalui analisis terhadap laju pertumbuhan PDRB atas harga konstan yang mengukur pertumbuhan ekonomi suatu daerah dari tahun ke tahun.

Meskipun demikian, sejarah telah membuktikan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak secara instan dapat meningkatkan pembangunan di suatu daerah, hal tersebut harus berkesinambungan dengan kinerja pemda dalam mengalokasikan anggarannya meskipun seharusnya pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap kesejahteraan dan pembangunan manusia. Sejalan dengan hal tersebut, pertumbuhan ekonomi dapat diklasifikasikan sebagai indikator penting dalam meningkatkan pembangunan manusia. Fretes (2017) telah membuktikan secara empiris bahwa Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM. Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis pertama dirumuskan sebagai berikut.

H1 : Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia.

Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran

Pertumbuhan Ekonomi merupakan indikator dalam melihat kemajuan pembangunan daerah yang diasumsikan akan melahirkan lapangan pekerjaan dan peluang ekonomi yang lain secara merata di suatu daerah Fretes (2017). Pertumbuhan Ekonomi merupakan salah satu indikator dari pembangunan suatu daerah, hal tersebut menjadikan pertumbuhan ekonomi menjadi krusial untuk melihat dari beberapa aspek, salah satunya ialah dalam mengukur pertumbuhan ekonomi melalui analisis terhadap laju pertumbuhan PDRB atas harga konstan yang mengukur pertumbuhan ekonomi suatu daerah dari tahun ke tahun.

Menurut Permendagri No. 13 Tahun 2016 menyatakan bahwa SILPA terjadi surplus penerimaan dalam neto positif, dimana komponen penerimaan lebih besar dibanding komponen penerimaan dalam satu periode. Sedangkan PE merupakan sumber akses penerimaan daerah, meningkatnya penerimaan daerah dapat berimplikasi terhadap meningkatnya jumlah SILPA apabila pemda tidak kompeten dalam

mengalokasikan anggarannya. Sejalan dengan hal tersebut, peneliti mencoba menemukan bukti secara empiris bahwa PE berpengaruh signifikan terhadap SILPA. Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis kedua pada penelitian ini adalah:

H2: Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh positif terhadap Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran.

Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Pendapatan Asli Daerah

Salah satu indikator keberhasilan atau pembangunan ekonomi di suatu wilayah ialah pertumbuhan ekonomi. Billady dan Marhaeni (2019) menyatakan bahwa peningkatan PE akan mendorong PAD di suatu daerah, adanya peningkatan PE akan memicu meningkatkan penerimaan daerah yang menyebabkan PAD meningkat dari tahun-tahun sebelumnya. Disisi lain, menurut Permendagri No. 13 Tahun 2006 PAD dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan, diantaranya ialah pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan lain-lain yang dianggap sah. PAD merupakan sumber utama pembelanjaan daerah, jika PAD terus meningkat maka akan berimplikasi terhadap berkurangnya ketergantungan pemda terhadap pemerintah pusat. Selain itu, jika PAD terus meningkat maka pemda memiliki anggaran yang cukup untuk menjalankan program-program yang berdampak terhadap pembangunan manusia. Desmawati dkk. (2015) telah membuktikan secara empiris bahwa PE berpengaruh signifikan terhadap PAD. Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis ketiga pada penelitian ini adalah.

H3 : Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia

Menurut E. A. Siregar (2019) merupakan sekumpulan pos-pos penerimaan daerah yang berasal dari empat sumber pendapatan daerah yang berupa pajak maupun non pajak. PAD merupakan salah satu indikator penting dalam melihat kualitas pembangunan, khususnya kualitas pembangunan manusia. Pembangunan manusia merupakan hal yang krusial dalam kehidupan bernegara dimana pembangunan manusia yang diukur menggunakan IPM merupakan keberhasilan suatu daerah dalam membangun daerahnya. Temuan-temuan terdahulu telah membuktikan bahwa PAD berpengaruh signifikan terhadap diantaranya dilakukan oleh Fretes (2017) dan Wahyu dan Dwirandra (2015). Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis keempat pada penelitian ini ialah.

H4 : Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia.

Pengaruh Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran terhadap Pendapatan Asli Daerah

Fitroh dan Putra (2016) menyatakan bahwa SILPA merupakan salah satu sumber penerimaan pemda, hal ini dikarenakan SILPA merupakan sisa lebih atau surplus yang terjadi dalam netto positif sehingga kelebihan tersebut dialokasikan pada tahun berikutnya. Di sisi lain, PAD merupakan penerimaan utama daerah yang digunakan untuk menjalankan program-program pemda yang tidak dianggarkan dalam APBD murni. Berdasarkan penjabaran tersebut, perlu dilakukan pengujian lebih lanjut terkait pengaruh SILPA terhadap PAD. Oleh karena itu, hipotesis kelima pada penelitian ini dirumuskan sebagai

berikut.

H5 : Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Pengaruh Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran terhadap Indeks Pembangunan Manusia

SILPA terjadi karena adanya surplus penerimaan daerah dalam neto yang positif, dimana komponen penerimaan lebih besar dibanding komponen pengeluaran. SILPA menjadi indikator dalam melihat kemampuan pemerintah dalam daerah mengalokasikan anggarannya. Semakin tinggi SILPA di suatu daerah maka seharusnya tingkat pertumbuhan manusia di suatu daerah pun meningkat, hal ini dikarenakan pemerintah harus mengalokasikan anggarannya untuk mensejahterakan masyarakatnya, sehingga dapat difahami bahwa apabila terdapat SILPA pada anggaran daerah maka seharusnya pembangunan manusia di daerah tersebut cukup baik. Sejalan dengan penjabaran tersebut, perlu diketahui apabila pada suatu daerah dari tahun ke tahun memiliki SILPA dengan jumlah yang relatif besar maka perlu dipertanyakan bagaimana kemampuan pemda dalam mengalokasikan anggarannya, sehingga perlu adanya analisis lebih lanjut terkait pengaruh SILPA terhadap pembangunan manusia di suatu daerah, khususnya pembangunan manusia yang diukur menggunakan IPM. Wahyu dan Dwirandra (2015) telah membuktikan secara empiris bahwa SILPA berpengaruh positif terhadap dan signifikan terhadap IPM. Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis keenam pada penelitian ini ialah.

H6 : Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia.

Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Indeks Pembangunan Manusia dimediasi oleh Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran

PE merupakan akses utama dalam penerimaan daerah sedangkan SILPA merupakan indikator dalam dalam menilai kemampuan pemda dalam mengelola anggarannya. Sejatinya, apabila PE di suatu daerah meningkat maka penerimaan pemda cenderung akan meningkat dan dapat dipergunakan oleh pemda untuk menjalankan program-program pemda yang berkaitan dengan pembangunan manusia di suatu daerah. Adapun SILPA merupakan surplus anggaran pemda dalam neto positif dimana komponen penerimaan lebih besar dibanding komponen pengeluaran. Apabila disuatu daerah pemda memiliki jumlah SILPA yang besar maka pemda dapat mengalokasikan dana tersebut untuk menjalankan program-program pemda yang tidak dianggarkan dalam APBD murni. Sejalan dengan hal tersebut, dapat difahami bahwa PE dan SILPA dapat berimplikasi terhadap pembangunan manusia yang diukur menggunakan IPM. Disisi lain, Wahyu dan Dwirandra (2015) dan Fretes (2017) telah membuktikan secara empiris bahwa PE dan SILPA berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM. Pada penelitian ini, peneliti mencoba mengintegrasikan model penelitian dengan menjadikan SILPA sebagai variabel mediasi. Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis ketujuh pada penelitian ini adalah.

H7 :Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia dengan dimediasi oleh Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran.

Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Indeks Pembangunan Manusia dimediasi oleh Pendapatan Asli Daerah

PE dan PAD merupakan indikator pembangunan suatu daerah. Semakin tinggi tingkat PE suatu daerah maka akan berkontribusi terhadap peningkatan PAD. Sejatinya, pembangunan tidak hanya berfokus pada pembangunan ekonomi dan infrastruktur, namun pembangunan yang lebih krusial adalah pembangunan manusia yang diukur menggunakan IPM. Penelitian terdahulu telah berhasil membuktikan bahwa PE dan PAD dapat berkontribusi terhadap peningkatan IPM dimana penelitian tersebut dilakukan oleh Fretes (2017). Pada penelitian ini, peneliti mencoba mengintegrasikan model penelitian dengan menjadikan SILPA sebagai variabel mediasi. Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis kedelapan pada penelitian ini adalah.

H8 :Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia dimediasi oleh Pendapatan Asli Daerah.

Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Indeks Pembangunan Manusia dimediasi oleh Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran dan Pendapatan Asli Daerah

Fretes (2017) membuktikan secara empiris bahwa PE berpengaruh signifikan terhadap IPM dan penelitian Wahyu dan Dwirandra (2015) telah membuktikan secara empiris bahwa SILPA berpengaruh terhadap IPM. Disisi lain, Fretes (2017) telah membuktikan bahwa PE berpengaruh terhadap IPM. Berdasarkan hasil-hasil penelitian tersebut, penulis mengeksplorasi hubungan antar variabel-variabel tersebut dengan hipotesis kesembilan pada penelitian ini adalah :

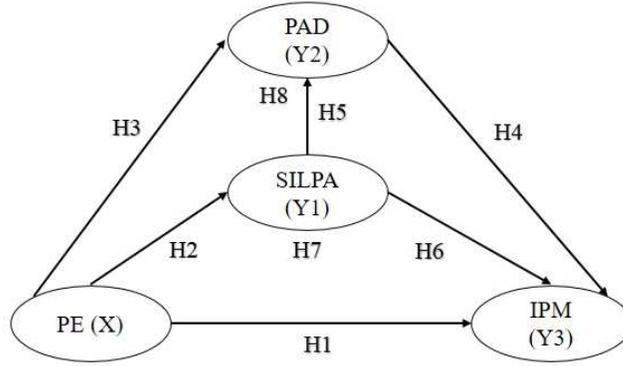
H₉: Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia dimediasi oleh Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran dan Pertumbuhan Ekonomi.

3. Metode Penelitian

Populasi penelitian ini adalah Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur dengan teknik sampel menggunakan metode purposive sampling. Kriteria yang digunakan dalam teknik *purposive sampling* pada penelitian ini adalah Kabupaten/Kota yang berdiri sejak tahun 2010 dan melaporkan LRA selama sepuluh tahun sehingga dapat diakses di situs resmi DJPK. Berdasarkan kriteria tersebut terdapat satu Kabupaten yang tidak memenuhi syarat, yaitu Kabupaten Mahakam Ulu yang baru berdiri sejak tahun 2013, sehingga hanya terdapat 9 Kabupaten/Kota yang memenuhi syarat sebagai sampel penelitian. Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh situs resmi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) dan Badan Pusat Statistik (BPS).

Analisis data dilakukan dengan pendekatan analisis jalur dengan metode SEM-PLS. Pengujian hipotesis dilakukan setelah dilakukan pengujian terhadap model struktural (*outer* dan *inner model*) dengan kriteria pengujian: jika nilai koefisien >1 artinya terdapat hubungan positif, jika 0 artinya tidak terdapat

hubungan dan jika <1 artinya memiliki hubungan negatif. Adapun nilai P Value, jika <0,005 artinya signifikan dan jika <0,001 artinya memiliki nilai signifikansi tinggi. Hubungan konstruk terhadap variabelnya, pada penelitian ini bersifat formatif dan setiap perubahan yang terjadi pada indikator formatif akan memberikan pengaruh terhadap variabelnya (Sholihin dan Ratmono, 2021). Berdasarkan rumusan hipotesis, maka model SEM -PLS yang diuji dapat digambarkan sebagai berikut.



Gambar 2. Model Penelitian

4. Analisis dan Pembahasan

Analisi Deskriptif

Tabel 2 Hasil Analisis Deskriptif

Variabel	N	Minimum	Maksimum	Mean
IPM	90	65,90	79,93	72,50
PAD	90	Rp 6.073	Rp 4.588.751	Rp 251.950
SILPA	86	Rp 6.100	Rp 3.447.898	Rp 397.049
PE	90	1,28	21,75	4,3
Valid N	86			

Sumber: data diolah 2021.

Tabel 2 menjelaskan nilai rata-rata IPM di Kab/Kota Kalimantan Timur ialah sebesar 72,50, terendah 65,90 yang terdapat pada Kab. Kutai Barat pada tahun 2016 dan tertinggi 79,93 yang terdapat pada Kota Samarinda pada tahun 2018. Uraian tersebut memberikan makna bahwa IPM Kalimantan Timur masuk ke dalam kategori tinggi. PAD merupakan sumber utama penerimaan suatu daerah, semakin tinggi PAD suatu daerah maka akan berimplikasi terhadap berkurangnya ketergantungan transfer pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat. Menurut Permendagri No. 13 Tahun 2006 PAD memiliki empat komponen yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan lain-lain yang dianggap sah. Nilai rata-rata PAD ialah sebesar Rp 251,950 miliar dengan nilai terendah Rp 6,073 triliun yang terdapat pada

Kab. Kutai Barat pada tahun 2011 dan tertinggi Rp 4.588.75i triliun yang terdapat pada Kota Samarinda pada tahun 2017.

Nilai rata-rata SILPA adalah sebesar Rp 397.049 miliar dengan nilai terendah sebesar Rp 6.100 miliar yang terdapat pada Kota Samarinda pada tahun 2010 dan nilai tertinggi sebesar Rp 3.447.898 triliun yang terdapat pada Kab. Kutai Kartanegara pada tahun 2013. Laju Pertumbuhan Ekonomi selama kurun waktu sepuluh tahun terakhir rata-rata sebesar 4,3 persen dengan nilai terendah sebesar 1,28 persen yang terdapat pada Kab. Penajam Paser Utama pada tahun 2010 dan pertumbuhan tertinggi sebesar 21,75 persen yang terdapat pada Kota Bontang pada tahun 2012.

Evaluasi Model Pengukuran (Outer Model)

Tabel 3. Pengukuran Bobot Indikator

Indikator	PE	SILPA	PAD	IPM	P Value	VIF	Evaluasi
PDRB-HK	1.000	0.000	0.000	0.000	<0.001	0.000	Layak
SILPA	0.000	1.000	0.000	0.000	<0.001	0.000	Layak
PAD	0.000	0.000	1.000	0.000	<0.001	0.000	Layak
IPM	0.000	0.000	0.000	1.000	<0.001	0.000	Layak

Sumber: Output WarpPLS

Tabel 3 menjelaskan hasil uji Outer Model berikut. Indikator Pendapatan Daerah Regional Bruto - Harga Konstan (PDRB-HK) memiliki bobot 1.000, P Value <0.001 (<0.05) dan VIF 0.000 (<5.5) berarti layak, indikator Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) memiliki bobot 1.000, P Value <0.001 (<0.05) dan VIF 0.000 (<5.5) berarti layak, indikator Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki bobot 1.000, P Value <0.001 (<0.05) dan VIF 0.000 (<5.5) berarti layak dan indikator IPM memiliki bobot 1.000, P Value <0.001 (<0.05) dan VIF 0.000 (<5.5) berarti layak.

Evaluasi Model Struktural (Inner Model)

Tabel 4. Koefisien Variabel

Keterangan	IPM	PE	PAD	SILPA
R-Square	0.345	-	0.066	0.075
Full Collinearity (VIFs)	1.133	1.045	1.023	1.107
Q-Square	0.331	-	0.099	0.084

Sumber: Output WarpPLS.

Pada tabel 4 terdapat nilai R^2 (R-Square) masing-masing variabel endogen sebesar: IPM 0.345, PAD 0.066 dan SILPA 0.075 dan adapun variabel PE tidak memiliki nilai R^2 karena variabel tersebut merupakan variabel eksogen. Nilai R^2 merupakan ukuran yang ditentukan untuk memprediksi kekuatan model, semakin tinggi nilai R^2 maka menandakan bahwa model penelitian semakin baik, disisi lain nilai R^2 juga merupakan *Sample Predictive Power* karena merupakan korelasi kuadrat antara nilai aktual dan nilai prediksi sebuah variabel laten endogen (Sholihin dan Ratmono, 2021). Selain nilai R^2 , terdapat nilai *Full*

Collinearity VIFs yang digunakan untuk menilai model kolinearitas. Hair Jr dkk. (2016) memberikan panduan terkait bagaimana batasan maksimum untuk kolinearitas, yaitu toleransi dibawah 0.20 atau VIFs berada di atas 5. Berdasarkan tabel 4 yang telah disajikan, dapat diketahui bahwa masing-masing variabel memiliki nilai VIFs dibawah 3.3 dan hal ini menandakan bahwa pada penelitian ini tidak terdapat masalah kolinearitas.

Pengujian Q^2 pada masing-masing variabel yaitu IPM 0.331; SILPA 0.084 dan PAD 0.099 yang menandakan bahwa seluruh variabel pada penelitian ini relevan dan valid ($Q = <0.0$). Ghazali dan Latan (2015) memberikan panduan terkait bagaimana standar yang digunakan dalam menilai tingkat Q^2 pada masing-masing variabel diantaranya ialah Q^2 0.75 (kuat). 0.50 (moderat) dan 0.25 (lemah). Berdasarkan panduan tersebut maka disimpulkan bahwa nilai Q^2 pada penelitian ini adalah sebagai berikut; IPM 0.331 tergolong kuat; SILPA 0.084 tergolong kuat dan PAD 0.099 tergolong kuat.

Uji Kesesuaian Model (Fit and Quality Indices)

Pengujian *Fit and Quality Indices (Goodness Of Fit)* bertujuan untuk mengetahui kesesuaian model pada penelitian ini yang digunakan sebagai syarat dalam melakukan pengujian selanjutnya. *Goodness Of Fit* yang dimaksud ialah indeks dan ukuran kebaikan hubungan antara variabel laten (*inner model*) terkait dengan asumsi-asumsinya. Kriteria yang tercantum pada tabel 5 adalah bersifat *rule of thumb*, sehingga selayaknya tidak berlaku secara kaku dan mutlak. Bilamana terdapat satu atau dua indikator model *Fit and Quality Indices* tentunya model masih bisa dilanjutkan (Fernandes, 2017).

Tabel 5 Uji Kesesuaian Model (Fit and Quality Indices)

Model Fit and Quality Indices	Kriteria	Hasil Analisis	Ket
Average Path Coefficients (APC)	<0.05	APC = 0.252 P = 0.002	Baik
Average R-Squared (ARS)	<0.05	ARS = 0.162 P = 0.025	Baik
Average Block VIF	Acceptable if ≤ 5 Ideally ≤ 3.3	1.183	Ideal
Varange Full Collinearity VIF	Acceptable if ≤ 5 Ideally ≤ 3.3	1.007	Ideal
Tenenhaus GoF	Small ≥ 0.1 Medium ≥ 0.25 Large ≥ 0.36	0.403	Ideal
R-Squared Contribution Ratio	Acceptable if ≥ 0.9 Ideally ≥ 1	1.000	Ideal

Sumber: Output WarpPLS

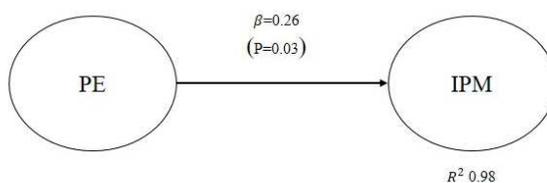
Berdasarkan tabel 5 tersebut dapat disimpulkan bahwa tiga indikator yang menentukan kualitas model penelitian yaitu APC.ARS. AVIF dan AFVIF. Nilai APC= 0.252 P=0.002 (<0.05), menunjukkan rata-rata koefisien jalur determinasi signifikan dengan tingkat signifikansi 0.05. Nilai ARS=0.162 P=0.02 (<0.05),

juga menunjukkan rata-rata koefisien jalur determinasi signifikan dengan tingkat signifikansi 0.05. Nilai AVIF= 1.183 dan AFVIF=1.007 (<3.3) menandakan bahwa model penelitian ini bebas dari gejala bias multikolinearitas, karena memenuhi kriteria dengan angka AVIF dan AFVIF dibawah 3.3.

Selanjutnya, Uji *Tanenhaus* GoF menunjukkan nilai relevansi sebesar 0.403 (<0.36) yang menandakan bahwa nilai GoF pada penelitian ini masuk ke dalam kategori *large*. Data ini menunjukkan bahwa model penelitian ini bersifat relevan dan dapat diandalkan. Hasil RSCR=1.000 *acceptable if >0.9. ideally >=1* menunjukkan bahwa nilai RSCR pada penelitian ini dapat diterima dan dapat diandalkan. Hasil keseluruhan dari Uji *Fit and Quality Indices* menunjukkan bahwa model yang diteliti didukung oleh data yang relevan dan dapat diandalkan.

Pengujian Pengaruh Langsung

Sebelum melakukan pengujian lebih lanjut. hal pertama yang harus dilakukan adalah menguji hubungan langsung antara PE dan IPM, sehingga selanjutnya pengujian terhadap PAD dan SILPA dapat dilanjutkan.

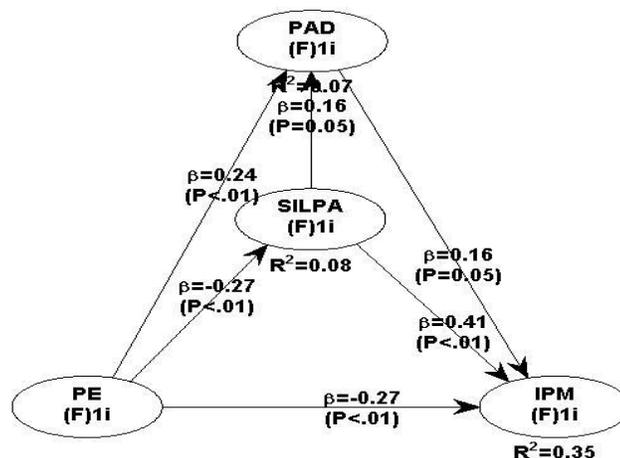


Gambar 3. Direct Test of PE->IPM

Pada gambar 3, menunjukkan PE berpengaruh positif terhadap IPM dengan koefisien sebesar 0.26 dan signifikan pada 0.03 (<0.05). Berdasarkan hasil ini, diduga terdapat pengaruh variabel lain yang berperan penting dalam pengujian PE terhadap IPM sehingga perlu dilakukan pengujian lebih lanjut untuk variabel-variabel tersebut.

Pengujian Pengaruh Tidak Langsung

Pada pengujian pengaruh secara langsung dan tidak langsung terjadi perubahan hasil estimasi antara Pertumbuhan Ekonomi terhadap IPM memiliki nilai koefisien sebesar 0.26 ($P < 0.03$), sedangkan pengujian pengaruh tidak langsung terjadi peningkatan nilai koefisien sebesar 0.27 ($P < 0.01$), namun tetap signifikan dengan tingkat signifikansi sebesar 0,005. Solihin dan Ratmono (2013) memberikan kriteria mengenai pengambilan kesimpulan tentang mediasi, jika koefisien pengujian secara langsung turun namun tetap signifikan dan maka bentuk mediasi adalah mediasi parsial. Dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan bahwa peran variabel mediasi pada penelitian ini masuk kedalam kategori parsial (lihat gambar 4).



Gambar 4. Pengujian Hubungan Tidak Langsung

Tabel 5. Rangkuman Koefisien Jalur dan P Value

Hubungan Antar Variabel	Path Coefficient	P Value	R ²	Keterangan
PE→IPM	0.27	<0.01	0.35	Signifikan
PE→SILPA	0.17	<0.01	0.08	Signifikan
PE→PAD	0.24	<0.01	0.07	Signifikan
PAD→IPM	0.16	0.05	-	Signifikan
SILPA→PAD	0.16	0.05	-	Signifikan
SILPA→IPM	0.41	<0.01	-	Signifikan
PE→SILPA→IPM	0.11	<0.01	-	Signifikan
PE→PAD→IPM	0.26	<0.01	-	Signifikan
PE→SILPA→PAD→IPM (0.27X0.16X0.41X0.16)	0.28	0.05	-	Signifikan

Sumber: Output WarpPLS, diolah

Setelah melakukan pengujian secara langsung dan tidak langsung maka selanjutnya dapat dianalisis lebih lanjut bagaimana peran variabel mediasi terhadap pengukuran secara langsung antara PAD terhadap IPM. Uji Variance Accounted For (VAF) yang dikembangkan oleh Preacher dan Hayes (2008) digunakan untuk mengukur seberapa besar pengaruh variabel mediasi terhadap pengaruh variabel eksogen terhadap variabel endogen. Jika nilai VAF >80% maka menunjukkan peran variabel mediasi penuh. jika nilai VAF 20-80% maka peran variabel mediasi parsial. dan jika nilai VAF <20%, maka menunjukkan tidak ada peran variabel mediasi pada penelitian ini. Hair Jr dkk. (2016) . Perhitungan nilai VAF dilakukan dengan menggunakan pengaruh langsung dan pengaruh tidak langsung, pada penelitian ini terdapat tiga jalur yang secara statistika tidak langsung antara PE terhadap IPM yaitu: (1) PE → SILPA → IPM; (2) PE→PAD→IPM; (3) PE→SILPA→PAD→IPM. Berdasarkan penjabaran diatas, maka dapat dihitung VAF sebagai berikut:

Tabel 6. Uji VAF (*Variance Accounted For*)

Jalur	Hubungan Variabel	Perhitungan	Jumlah	Kategori Mediasi
1	PE→SILPA→IPM	1. Pengaruh Tidak Langsung: PE→SILPA: 0,27 SILPA→IPM: 0,41	0,11	Parsial
		2. Pengaruh Langsung: PE→IPM	0,27	
		3. Pengaruh Total (1+2)	0,38	
		4. VAF (1:3)	0,28	
2	PE→PAD→IPM	1. Pengaruh Tidak Langsung: PE→PAD: 0,24 PAD→IPM: 0,16	0,38	Parsial
		2. Pengaruh Langsung: PE→IPM	0,27	
		3. Pengaruh Total (1+2)	0,65	
		4. VAF (1:3)	0,58	
3	PE→SILPA→PAD→IPM	1. Pengaruh Tidak Langsung: PE→SILPA: 0,27 SILPA→PAD: 0,16 PAD→IPM: 0,16	0,69	Parsial
		2. Pengaruh Langsung: PE→IPM	0,27	
		3. Pengaruh Total (1+2)	0,96	
		4. VAF (1:3)	0,71	
TOTAL		Total Pengaruh Tidak Langsung Total Pengaruh Langsung	1,18 0,27	
		Pengaruh Total	1,45	

Sumber: Output WarpPLS, diolah

Tabel 7 hasil pengujian peran mediator dalam pengujian PE terhadap IPM menghasilkan pengaruh total sebesar 1,45 dan jika pengujian dilakukan secara langsung hanya menghasilkan sebanyak 0,27. Hal ini menunjukkan bahwa peran variabel mediasi (PAD dan SILPA) sebagai mediator memberikan dampak terhadap pengujian PE terhadap IPM.

Pengujian Hipotesis Pertama (H_1)

Hipotesis pertama menyatakan bahwa pengujian pengaruh PE terhadap IPM berpengaruh signifikan dengan nilai koefisien 0.27 dan P Value sebesar <0.001 (<0.005). Secara statistika menyatakan bahwa

hipotesis pertama dapat diterima.

Pengujian Hipotesis Kedua (H₂)

Hipotesis ke dua menyatakan bahwa pengujian pengaruh PE terhadap SILPA berpengaruh signifikan dengan nilai koefisien 0.27 dan P Value sebesar <0.001 (<0.005). Secara statistika menyatakan bahwa hipotesis ke dua dapat diterima.

Pengujian Hipotesis Ketiga (H₃)

Hipotesis ke tiga menyatakan bahwa pengujian pengaruh PE terhadap PAD berpengaruh signifikan dengan nilai koefisien 0.24 dan P Value sebesar <0.001 (<0.005). Secara statistika menyatakan bahwa hipotesis ke tiga dapat diterima.

Pengujian Hipotesis Keempat (H₄)

Hipotesis ke empat menyatakan bahwa pengujian pengaruh PAD terhadap IPM berpengaruh signifikan dengan nilai koefisien 0.16 dan P Value sebesar 0.005 (<0.005). Secara statistika menyatakan bahwa hipotesis ke empat dapat diterima.

Pengujian Hipotesis Kelima (H₅)

Hipotesis ke lima menyatakan bahwa pengujian pengaruh SILPA terhadap PAD berpengaruh signifikan dengan nilai koefisien 0.16 dan P Value sebesar 0.005 (<0.005). Secara statistika menyatakan bahwa hipotesis kelima dapat diterima.

Pengujian Hipotesis Keenam (H₆)

Hipotesis ke enam menyatakan bahwa pengujian pengaruh SILPA terhadap IPM berpengaruh signifikan dengan nilai koefisien 0.16 dan P Value sebesar <0.001 (<0.005). Secara statistika menyatakan bahwa hipotesis keenam dapat diterima.

Pengujian Hipotesis Ketujuh (H₇)

Hipotesis ke tujuh menyatakan bahwa pengujian pengaruh PE terhadap IPM dengan dimediasi oleh SILPA berpengaruh signifikan. Uraian tersebut memberikan makna bahwa hipotesis ke tujuh pada penelitian ini dapat diterima.

Tabel 8. Pengaruh Total PE terhadap IPM melalui mediasi SILPA

Jalur	P Value	Total Effect
PE→SILPA→IPM	<0.001	0.38

Hasil analisis pengaruh PE terhadap IPM melalui SILPA memiliki pengaruh total sebesar 0.38 sedangkan pengujian secara langsung antara PE terhadap IPM hanya memiliki pengaruh 0.27. Hal ini memberikan makna bahwa capaian IPM yang terus meningkat harus diimbangi dengan prekonomian pemda yang stabil dan optimalisasi SILPA oleh pemda.

Pengujian Hipotesis Kedelapan (H₈)

Hipotesis kedelapan menyatakan bahwa PE berpengaruh terhadap IPM dengan dimediasi oleh PAD. Hal ini memberikan makna bahwa hipotesis kedelapan dapat diterima.

Tabel 9. Pengaruh Total PE terhadap IPM melalui mediasi PAD

Jalur	P Value	Total Effect
PE→PAD→IPM	<0.001	0.65

Hasil pengujian pengaruh PE terhadap IPM melalui SILPA dan PAD memiliki pengaruh total sebesar 0.96 sedangkan pengujian secara langsung antara PE terhadap IPM hanya memiliki pengaruh sebesar 0.27. Hal ini memberikan makna bahwa capaian IPM yang terus meningkat dipengaruhi oleh meningkatnya perekonomian khususnya yang berkaitan dengan potensi daerah sehingga dapat meningkatkan penerimaan daerah, hal tersebut harus diimbangi dengan kemampuan optimalisasi anggaran oleh pemda untuk menjalankan program-program yang sesuai dengan tujuan utama desentralisasi fiskal.

Pembahasan

Hasil pengujian secara langsung menyatakan PE berpengaruh terhadap IPM, dalam proses peningkatan IPM dibutuhkan Pertumbuhan Ekonomi yang stabil serta variansi pertumbuhan IPM dapat mempengaruhi peningkatan IPM di Kalimantan Timur. Pertumbuhan Ekonomi berperan penting dalam membiayai belanja modal dan akan berkontribusi terhadap pembangunan manusia. Hasil penelitian ini memperkuat hasil penelitian yang dilakukan oleh Fretes (2017), Maulana dan Bowo (2013), Mirza (2012) dan Rakhmawati dkk. (2017) yang menyatakan bahwa PE berpengaruh terhadap IPM. Sebaliknya, hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nainggolah dkk. (2012) yang menyatakan bahwa PE tidak berpengaruh terhadap IPM.

Pengujian hipotesis ke dua menyatakan bahwa PE berpengaruh terhadap SILPA. PE yang besar dapat berpengaruh terhadap penerimaan daerah dan dapat berimplikasi terhadap surplus pembiayaan dalam neto positif. Hasil pengujian tersebut sejalan dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 yang menyatakan bahwa SILPA terjadi akibat adanya selisih dari realisasi penerimaan dan pengeluaran dalam satu periode. Tingginya penerimaan daerah merupakan salah satu implikasi dari laju pertumbuhan ekonomi dimana PE merupakan sektor penyumbang utama penerimaan daerah melalui beberapa sektor, diantaranya ialah sektor perdagangan, hotel dan restoran yang berkaitan erat dengan penerimaan pajak dan retribusi daerah, sehingga hal tersebut berkontribusi terhadap peningkatan penerimaan daerah dan menyebabkan adanya surplus dalam neto positif dalam satu periode.

Pengujian hipotesis ke tiga menyatakan bahwa PE berpengaruh terhadap PAD. Jika pemda ingin terus meningkatkan PAD maka hendaknya pemda harus menjaga stabilitas PE di Kalimantan Timur karena meningkatnya PAD merupakan implikasi dari PE yang terus meningkat. Hasil penelitian ini mengonfirmasi penelitian yang dilakukan oleh Desmawati dkk. (2015) yang menyatakan bahwa PAD berpengaruh terhadap PE. Meskipun demikian, hasil penelitian ini tidak mengonfirmasi penelitian yang dilakukan oleh Kartika (2020) yang menyatakan bahwa PE tidak berpengaruh terhadap PAD.

Pengujian hipotesis ke empat menyatakan bahwa PAD berpengaruh terhadap IPM, dalam upaya peningkatan IPM pemda hendaknya meningkatnya penerimaan daerahnya, hal tersebut dikarenakan ketika pemda memiliki anggaran yang cukup maka pemda memiliki ruang fiskal yang baik sehingga pemda leluasa dalam menjalankan program-program daerah, khususnya program yang berkaitan erat dengan desentralisasi fiskal. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Fretes (2017) dan Wahyu dan Dwirandra (2015) yang menyatakan bahwa PAD berpengaruh terhadap IPM. Namun sebaliknya, penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Farwas (2020) yang

menyatakan bahwa PAD tidak berpengaruh terhadap IPM.

Pengujian hipotesis ke lima menyatakan bahwa SILPA berpengaruh terhadap PAD, jumlah SILPA dari tahun sebelumnya akan dialokasikan ke periode berikutnya untuk digunakan sebagai penyeimbang APBD. Hasil pengujian ini mendukung pernyataan Fitroh dan Putra (2016) yang menyatakan bahwa SILPA merupakan salah satu penerimaan utama pemda, hal ini dikarenakan SILPA merupakan surplus anggaran dalam neto positif sehingga kelebihan anggaran tersebut dapat dialokasikan pada periode berikutnya. Hal ini memberikan makna bahwa jumlah SILPA yang relatif besar berkontribusi terhadap penerimaan daerah.

Pengujian hipotesis ke enam menyatakan bahwa SILPA berpengaruh terhadap IPM, hal ini memberikan makna bahwa SILPA dapat digunakan sebagai penyeimbang APBD sehingga pemda memiliki ruang fiskal yang baik sehingga pemda dapat leluasa dalam menjalankan program-program pemda yang berkaitan erat dengan pembangunan manusia. Hasil penelitian ini mengonfirmasi penelitian yang dilakukan oleh Indrawati (2016) dan Wahyu dan Dwirandra (2015) yang menyatakan bahwa SILPA berpengaruh terhadap IPM. Namun sebaliknya, penelitian ini tidak mengonfirmasi penelitian yang dilakukan oleh Adiputra dkk., (2015) yang menyatakan bahwa SILPA tidak berpengaruh terhadap IPM.

Pengujian hipotesis ke tujuh pada penelitian ini menyatakan bahwa PE berpengaruh terhadap IPM melalui SILPA, hal ini memberikan makna bahwa pertumbuhan ekonomi yang stabil berkontribusi terhadap meningkatnya penerimaan daerah. Meningkatnya penerimaan daerah memungkinkan terjadi surplus dalam neto yang positif, sehingga kelebihan anggaran tersebut dapat dialokasikan ke tahun berikutnya sehingga pemda memiliki ruang fiskal yang baik sehingga pemda leluasa dalam menjalankan program-program daerah yang berkontribusi terhadap peningkatan kualitas manusia.

Pengujian hipotesis ke delapan pada penelitian ini menyatakan bahwa PE berpengaruh terhadap IPM melalui PAD, hal ini memberikan makna bahwa pertumbuhan ekonomi yang stabil berpengaruh terhadap meningkatnya penerimaan daerah. Meningkatnya penerimaan daerah menjadikan pemda memiliki ruang fiskal yang baik sehingga pemda leluasa dalam menjalankan program-program daerah yang berkaitan erat dengan tujuan utama desentralisasi fiskal.

Pengujian hipotesis ke sembilan pada penelitian ini menyatakan bahwa PE berpengaruh terhadap IPM melalui SILPA dan PAD, hal ini memberikan makna bahwa pertumbuhan ekonomi yang stabil berpengaruh terhadap meningkatnya penerimaan daerah. Meningkatnya penerimaan daerah memungkinkan terjadi surplus jika pemda tidak mengoptimalkan penggunaan anggarannya. Jumlah penerimaan yang terlalu besar berimplikasi terhadap terjadinya surplus dalam neto yang positif, sehingga kelebihan anggaran tersebut dapat dialokasikan ke periode berikutnya sebagai penyeimbang APBD dan menyebabkan anggaran pemda ditahun berikutnya meningkat. Meningkatnya penerimaan daerah menjadikan pemda memiliki ruang fiskal yang baik sehingga pemda leluasa dalam menjalankan program-program daerah yang berkaitan erat dengan tujuan utama desentralisasi fiskal.

5. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengujian dan pembahasan dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1) IPM Kalimantan Timur selama sepuluh tahun terakhir masuk ke dalam kategori “tinggi”.
- 2) Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kalimantan Timur.

Pertumbuhan Ekonomi merupakan kunci dalam meningkatkan penerimaan daerah sehingga pemda dapat menjalankan program-program daerah yang berkaitan erat dengan tujuan utama desentralisasi fiskal.

- 3) Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh terhadap Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran di Kalimantan Timur. Pertumbuhan Ekonomi yang stabil berkontribusi terhadap peningkatan penerimaan daerah sehingga terjadi surplus penerimaan dalam neto positif, dimana sisi penerimaan pemda lebih besar dibanding sisi pengeluaran.
- 4) Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kalimantan Timur. Pertumbuhan Ekonomi yang stabil berkontribusi terhadap penerimaan daerah, hal tersebut terjadi karena pemda berusaha mengoptimalkan potensi daerah yang merupakan komponen penerimaan pemda.
- 5) Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap peningkatan Indeks Pembangunan Manusia di Kalimantan Timur. Penerimaan daerah yang besar membuat pemda dapat menjalankan program-program daerah yang berkaitan dengan pembangunan manusia.
- 6) Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran berpengaruh terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kalimantan Timur. Surplus anggaran yang terjadi dapat digunakan untuk menjalankan program pemda yang tertunda ditahun sebelumnya.
- 7) Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kalimantan Timur. Sisa lebih pembiayaan di tahun sebelumnya dapat digunakan untuk menjalankan program-program yang belum dilaksanakan atau tidak dianggarkan dalam APBD murni.
- 8) Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia melalui mediasi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran. Pertumbuhan Ekoomi yang tinggi berkontribusi terhadap peningkatan penerimaan daerah sehingga terjadi surplus dalam neto yang positif, sehingga pemda leluasa dalam menggunakan anggaran untuk menjalankan program-program yang berkaitan dengan tujuan utama desentralisasi fiskal.
- 9) Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia melalui mediasi Pendapatan Asli Daerah. Pertumbuhan Ekonomi menyebabkan penerimaan daerah meningkat sehingga pemda memiliki ruamng fiskal yang baik untuk menjalankan program-program yang berkaitan dengan pembangunan manusia.
- 10) Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia melalui mediasi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran dan Pendapatan Asli Daerah.

6. Keterbasan dan Saran

Penelitian ini dilakukan dengan tidak mempertimbangkan karakteristik pemda yang menjadi obyek penelitian. Hasil penelitian mungkin akan berbeda jika penelitian ini diuji dengan mempertimbangkan karakteristik pemda. Berdasarkan pembahasan hasil penelitian, maka disarankan

- 1) Temuan empiris pada penelitian ini menyatakan bahwa Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia melalui mediasi oleh Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran dan Pendapatan Asli Daerah. Berdasarkan hal tersebut, disarankan pemda terus mengupayakan percepatan pertumbuhan ekonomi karena hal tersebut merupakan aspek penting dalam mewujudkan tujuan desentralisasi fiskal. Di sisi lain, pemda disarankan untuk meningkatkan kemampuan daya serap

pemda terhadap anggarannya agar jumlah sisa pembiayaan tidak terlalu besar agar tercipta kinerja pemda yang sehat.

- 2) Temuan empiris pada penelitian ini dapat digunakan sebagai perluasan referensi bagi pengembangan teori di sektor keuangan daerah. Hal tersebut dikarenakan selama ini Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tidak banyak diteliti, terlebih pada penelitian ini Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran menjadi variabel mediasi antara Pertumbuhan Ekonomi terhadap Indeks Pembangunan Manusia.
- 3) Untuk penelitian lanjutan, disarankan menggunakan SILPA sebagai pemoderasi antara determinan variabel IPM terhadap IPM.

Daftar Pustaka

- Adiputra, I. M. P., Dwiyantari, N. K. D., dan Darmada, D. K. (2015). Pengaruh PAD, dana perimbangan dan SILPA terhadap kualitas pembangunan manusia dengan alokasi belanja modal sebagai variabel intervening (studi pada pemerintah kabupaten/kota di Bali). *Simposium Nasional Akuntansi XVIII*.
- Balitbangda, N., dan Binatama, C. T. (2008). Analisis tentang tingkat efisiensi dan efektivitas pengeluaran pemerintah terhadap pembangunan daerah di provinsi nusa tenggara timur. *Jurnalitbangda NTT*, 4.
- BPS. (2019b). Produk domestik regional bruto provinsi kalimantan timur menurut lapangan usaha 2015-2019.
- Desmawati, A., Zamzami, Z., dan Zulgani, Z. (2015). Pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap pendapatan asli daerah kabupaten/kota di provinsi jambi. *Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah*, 3(1), 49-58.
- Farwas, E. L. (2020). Pengaruh sumber keuangan pad & non pad terhadap ipm kabupaten biak numfor provinsi papua.
- Fernandes, A. A. R. (2017). *Metode statistika multivariat pemodelan persamaan struktural (sem) pendekatan warppls*: Universitas Brawijaya Press.
- Fitroh, M., dan Putra, I. S. (2016). Pengaruh sisa lebih perhitungan anggaran (silpa) terhadap penetapan jumlah anggaran pada tahun anggaran berikutnya. *Jurnal Penelitian Teori & Terapan Akuntansi (PETA)*, 1(1), 1-19.
- Fretes, P. N. d. (2017). Pengaruh dana perimbangan, pendapatan asli daerah, dan pertumbuhan ekonomi terhadap indeks pembangunan manusia di kabupaten kepulauan yapen. *Jurnal Akuntansi & Ekonomi FE. UN PGRI Kediri*, 2(2), 1-33.
- Hair Jr, J. F., Hult, G. T. M., Ringle, C., dan Sarstedt, M. (2016). *A primer on partial least squares structural equation modeling (pls-sem)*: Sage publications.
- Indrawati, C. (2016). Pengaruh dau, dak, dan silpa terhadap kualitas pembangunan manusia dengan belanja modal sebagai variabel intervening (studi pada pemerintah kabupaten/kota di pulau jawa tahun 2014).
- Kartika, A. (2020). Pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap pendapatan asli daerah di kabupaten berau. *ECO-BUILD; Economy Bring Ultimate Information All About Development Journal*, 4(1), 1-7.
- Kayame, H., Arie, M., Razak, A., dan Pittingi, F. (2017). The increase of region own source revenue in realizes the prosperity of papua communities. *IOSR Journal of Humanities and Social Science (IOSR-JHSS) Volume*, 22, 45-52.

- Lamba, A., Novan, R., Lamba, R. A., dan Patma, K. (2020). The impact of economic growth and capital expenditures in supporting quality human development. *The International Journal of Social Sciences World (TIJOSSW)*, 2(2), 100-109.
- Mardiasmo, A. (2002). Otonomi dan manajemen keuangan daerah: Good governance. *Democratization, Local Government Financial Management*.
- Maulana, R., dan Bowo, P. A. (2013). Pengaruh pertumbuhan ekonomi, pendidikan dan teknologi terhadap ipm provinsi di indonesia 2007-2011. *JEJAK: Jurnal Ekonomi dan Kebijakan*, 6(2).
- Megasari, I. A. G. S. (2015). Pengaruh pendapatan asli daerah, selisih lebih perhitungan anggaran dan flypaper effect pada perilaku oportunistik penyusun anggaran. *Buletin Studi Ekonomi*, 44264.
- Mirza, D. S. (2012). Pengaruh kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, dan belanja modal terhadap indeks pembangunan manusia di jawa tengah tahun 2006-2009. *Economics Development Analysis Journal*, 1(2).
- Mutiha, A. H. (2018). The effect of regional own-source revenue, tax revenue-sharing fund, general allocation fund and special allocation fund to the human development index (based on the study of provincial government in indonesia). *KnE Social Sciences*, 609-624-609-624.
- Nainggolan, L. E., Sembiring, L. D., dan Nainggolan, N. T. (2021). Analisis pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap indeks pembangunan manusia yang berdampak pada kemiskinan di provinsi sumatera utara. *Media Bina Ilmiah*, 15(10), 5457-5474.
- Pigou, A. (1920). *The economics of welfare*. London: Macmillan and co., ltd.
- Preacher, K. J., dan Hayes, A. F. (2008). Asymptotic and resampling strategies for assessing and comparing indirect effects in multiple mediator models. *Behavior research methods*, 40(3), 879-891.
- Rakhmawati, Z., Nazar, M. R., dan Zultilisna, D. (2017). Pengaruh pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah dan belanja daerah terhadap indeks pembangunan manusia (studi pada kota dan kabupaten di provinsi jawa barat periode 2010-2014). *eProceedings of Management*, 4(2).
- Sen, A. (2001). *Development as freedom*, (1st paperback ed), uk. In: USA: Oxford University Press.
- Sholihin, M., dan Ratmono, D. (2021). *Analisis sem-pls dengan warppls 7.0 untuk hubungan nonlinier dalam penelitian sosial dan bisnis*: Penerbit Andi.
- Sholihin, M., dan Ratmono, D. (2013). *Analisis sem-pls dengan warppls 3.0 untuk hubungan nonlinier dalam penelitian sosial dan bisnis* Yogyakarta: ANDI Yogyakarta.
- Silalahi, B., SBM, N., dan Nugroho, S. (2011). *Analisis pengaruh variabel kependudukan terhadap pdrb harga konstan di kabupaten jepara (1986-2008)*. Universitas Diponegoro,
- Siregar, B., dan Pratiwi, N. (2017). The effect of local government characteristics and financial independence on economic growth and human development index in indonesia. *Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan*, 19(2), 65-71.
- Syam A. Y., G. Chandrarin and Harsono. (2020). Effects of Fiscal Health on Human Development Index in Indonesia: Regional Government Performance Mediating Role. *International Journal of Innovative Science and Research Technology (IJISRT) 2019 Vol. Volume. 4 Issue. 10 Pages 50-59*
- Syam, A.Y, & Sarwani. (2021). Pengaruh Kemandirian Fiskal Terhadap Kualitas Pembangunan Manusia Pada Pemda Kabupaten dan Kota di Provinsi Kalimantan Selatan. *JURNAL ILMIAH BISNIS dan KEUANGAN*, 10(1). Retrieved from <http://journal.stiei-kayutangi->

bjm.ac.id/index.php/jibk/article/view/657

Tanjung, A. H. (2009). *Akuntansi Pemerintahan Daerah*. Bandung: Alfabeta.

Todaro, M. P. (1999). *Pembangunan ekonomi di dunia ketiga*. Jakarta: Erlangga.

UNDP. (1990). *Human Development Report 1990*.

Wahyu, I. P. A., dan Dwirandra, A. (2015). Kemampuan belanja modal memoderasi pengaruh PAD, DAU, DAK dan SILPA pada IPM. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 12(2015), 546-565.